

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semenjak Januari 2001, Indonesia memasuki fase baru dalam perjalanannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Sebagai bangsa yang sedang mengalami transisi, dirasakan sekali akan kebutuhan penataan kembali berbagai aspek kehidupan bangsa di tingkat pusat maupun lokal. Bangsa Indonesia telah membuka jendela baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana otonomi daerah dilaksanakan di seluruh kota maupun kabupaten di Indonesia. Kebijakan otonomi daerah telah menjadi pilihan bagi bangsa Indonesia. Kebijakan tersebut berdasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan berubah dari sistem pemerintahan yang sentralis menjadi desentralis. Konsekuensi logis dari sistem pemerintahan yang desentralis ini bahwa terjadi peningkatan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah yang sangat besar.

Semenjak otonomi daerah diberlakukan, proses pemekaran terjadi begitu pesat dan cenderung tidak terkendali. Pemekaran wilayah administratif telah menjadi suatu kecenderungan baru dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan baru untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek

rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan (Effendy, 2008). Pelaksanaan otonomi daerah yang terjadi belakangan ini telah memberikan semangat baru bagi sebagian daerah di Indonesia. Hal ini tercermin pada keinginan dari sebagian daerah tersebut untuk memekarkan diri. Terhitung semenjak UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah diberlakukan, terdapat 7 Propinsi, 135 Kabupaten dan 32 Kota yang terbentuk sebagai hasil pemekaran daerah baru di Indonesia.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Kabupaten / Kota dan Propinsi di Indonesia :
Tahun 2001-2008

Tahun	Jumlah Propinsi	Jumlah Kabupaten / Kota	Tahun	Jumlah Propinsi	Jumlah Kabupaten / Kota
2001	30	341	2005	32	440
2002	30	354	2006	33	440
2003	30	376	2007	33	456
2004	32	416	2008	33	483

Sumber : Hasil studi oleh Bappenas dan UNDP

Pada Tabel 1.1, jumlah propinsi terhitung sejak pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001 relatif tidak sebanyak perkembangan daerah di tingkat kabupaten/kota. Jumlah propinsi hanya mengalami kenaikan sebanyak 3 daerah tingkat propinsi dari sebanyak 30 propinsi pada tahun 2001 menjadi 33 propinsi pada tahun 2008. Untuk daerah tingkat kabupaten/kota meningkat sebanyak 142 daerah tingkat kabupaten/kota dari sebanyak 341 buah pada tahun 2001 menjadi 483 buah pada tahun 2008. Menurut Darumurti dan Rauta (2003), percepatan perkembangan jumlah daerah tingkat kabupaten/kota diperkirakan akan semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan, selain kemudahan persyaratan administrasi maupun ketentuan fisik wilayah yang disyaratkan oleh Departemen

Dalam Negeri, faktor lain didukung pula oleh masih banyaknya cakupan wilayah yang berpotensi menjadi daerah kabupaten/kota baru.

Semangat otonomi daerah dan keinginan yang kuat untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik dan penanggulangan kemiskinan secara efektif, rupanya menjadi alasan utama dan landasan yang kuat bagi sebagian daerah di Indonesia memekarkan diri. Seperti yang terjadi di propinsi Nusa Tenggara Timur, misalnya. Semenjak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001, terdapat 8 Kabupaten yang terbentuk sebagai hasil pemekaran daerah. Salah satu diantaranya adalah Kabupaten Nagakeo. Kabupaten Nagakeo merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Ngada. Kabupaten Nagakeo resmi menjadi kabupaten baru semenjak diberlakukannya Undang-undang No. 2 tahun 2007.

Semenjak resmi menjadi daerah otonom baru, berbagai pemikiran inovatif dan uji coba terus dilakukan sebagai upaya penyempurnaan pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat daerah melalui penyediaan layanan publik terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastuktur dan penanggulangan kemiskinan yang lebih baik. Hal ini terkait dengan dengan tujuan dan landasan utama pemekaran daerah yaitu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas (Hermanislamet, 2005 dalam Effendy, 2008). Melalui proses

perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia (Effendy, 2008).

Perkembangan selama dua tahun pasca pemekaran daerah menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah daerah Nagakeo dikatakan cukup berhasil. Hal ini terlihat dari adanya penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin dari 18,90 ribu orang atau 16,05 persen pada tahun 2007 menjadi 16,80 ribu orang atau 14,53 persen pada tahun 2008. Artinya terjadi pengurangan penduduk miskin sebanyak 2,10 ribu orang atau 1,52 persen dalam setahun. Hal sama juga terjadi pada Propinsi NTT dan Indonesia secara keseluruhan dimana terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak dari 65,30 ribu orang atau 1,86 persen di propinsi NTT dan sebanyak 2.205,00 ribu orang atau 1,16 persen di Indonesia.

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Nagakeo, Propinsi NTT dan Indonesia
Tahun 2007 – 2009

Tahun	Indonesia (ribu orang)	%	Propinsi NTT (ribu orang)	%	Kab. Nagakeo (ribu orang)	%
2007	37.168,30	16,58	1.163,60	27,51	18,90	16,05
2008	34.963,30	15,42	1.098,30	25,65	16,80	14,53
2009	33.828,40	13,27	929,50	24,16	14,28	13,44

Sumber : Badan Pusat Statistik, berbagai edisi.

Sebagaimana yang kita tahu bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa garis kemiskinan ini bisa melihat besar kecilnya jumlah penduduk miskin. Garis kemiskinan pada dasarnya diukur dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk

memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang serta aneka barang dan jasa (Kunjoro, 2006). Perkembangan hingga sekarang ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan garis kemiskinan di Kabupaten Nagekeo, propinsi NTT dan Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini didasarkan pada perubahan harga dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Tabel 1.3
Perkembangan Garis Kemiskinan
di Kabupaten Nagekeo, Propinsi NTT dan Indonesia
Tahun 2007 – 2009

Tahun	Indonesia (Rp/Kapita/Bulan)	Propinsi NTT (Rp/Kapita/Bulan)	Kab. Nagekeo (Rp/Kapita/Bulan)
2007	166.697	126.389	142.728
2008	182.636	161.693	158.294
2009	194.677	191.992	166.093

Sumber : Badan Pusat Statistik, berbagai edisi.

Peranan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan menjadi semakin penting sekarang ini. Dalam Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat pada 2005 menyatakan perlunya kontribusi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dalam upaya bersama untuk mengurangi kemiskinan. Dengan demikian tuntutan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik guna menanggulangi kemiskinan semakin jelas dan penting untuk dilaksanakan. Dalam menelaah kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan, sangatlah perlu dan penting untuk terlebih dahulu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Kebijakan

pemerintah daerah yang berorientasi pada program pengentasan kemiskinan sudah seharusnya didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan tersebut.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang saling berkaitan salah satunya adalah tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan merupakan indikator yang dapat menentukan miskin tidaknya seseorang. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka semakin besar pula pengeluaran untuk konsumsi dari orang tersebut. Begitupun sebaliknya jika semakin kecil tingkat pendapatan seseorang maka semakin kecil pula pengeluaran untuk konsumsi dari orang tersebut. Perkembangan selama dua tahun pasca pemekaran menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Nagekeo menunjukkan adanya peningkatan. Hal yang sama juga terjadi baik di Propinsi NTT maupun Indonesia secara keseluruhan. Gambaran impresif mengenai perkembangan rata-rata pendapatan pekapita di Kabupaten Nagekeo, Propinsi NTT dan Indonesia tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 1.4
Perkembangan Rata-rata Pendapatan Perkapita Penduduk
di Kabupaten Nagekeo, Propinsi NTT dan Indonesia
Tahun 2007 – 2009

Tahun	Indonesia (Rupiah)	Propinsi NTT (Rupiah)	Kab. Nagekeo (Rupiah)
2007	15.447.894	4.041.539	2.064.290
2008	19.520.207	4.469.637	2.125.813
2009	22.038.449	4.932.990	2.389.881

Sumber : Badan Pusat Statistik, berbagai edisi.

Paska pemekaran wilayah, pendapatan per kapita penduduk di Kabupaten Nagekeo terlihat mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar Rp 2.064.290 pada tahun 2007 menjadi Rp 2.125.813 pada tahun 2008 atau meningkat sebesar Rp 2.125.813 – Rp 2.064.290 = Rp 61.523. Proporsi kenaikannya masih lebih rendah dibandingkan kenaikan pendapatan per kapita di tingkat propinsi maupun kenaikan secara nasional. Di tingkat propinsi, yaitu Propinsi NTT, kenaikannya sebesar Rp 4.469.637 – Rp 4.041.539 = Rp 428.098. Sedangkan di tingkat nasional, kenaikannya sebesar Rp 19.520.207 – Rp 15.447.894 = Rp 4.072.313.

Keterkaitan pemekaran wilayah dan jumlah penduduk miskin terletak pada dua aspek, yaitu aspek struktur kependudukan dan aspek kebijakan regional (Suwandi, 2002). Pembentukan wilayah baru, seperti Kabupaten Nagekeo yang berasal dari daerah induknya Kabupaten Ngada akan merubah pula struktur jumlah penduduk, termasuk jumlah penduduk miskin. Dari aspek kebijakan berarti melihat pengaruh dari adanya pemekaran wilayah terhadap jumlah penduduk miskin yang dikaitkan dengan pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan. Adapun kebijakan ini dijalankan melalui pemerintah daerah setempat berdasarkan arahan ataupun koordinasi dari Kementrian Koperasi dan Kesejahteraan Rakyat dan Bappenas.

Selain PDRB perkapita, Pengeluaran pemerintah di sektor pembangunan, angka melek huruf dan jumlah penduduk yang tidak mendapat akses air minum bersih serta populasi penduduk tanpa akses fasilitas kesehatan pun juga berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di masyarakat pedesaan. Dengan demikian jelas bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat

kemiskinan masyarakat pedesaan yang dipakai dalam penelitian ini adalah berupa variabel-variabel yang telah disebutkan sebelumnya yakni PDRB perkapita, pengeluaran pemerintah di sektor pembangunan, angka melek huruf dan jumlah penduduk yang tidak mendapat akses air minum bersih serta populasi penduduk tanpa akses fasilitas kesehatan.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil sebagai dasar kejian dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaruh PDRB perkapita terhadap jumlah penduduk miskin masyarakat pedesaan di Kabupaten Nagekeo.
- 2) Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah di sektor pembangunan terhadap jumlah penduduk miskin masyarakat pedesaan di Kabupaten Nagekeo.
- 3) Bagaimana pengaruh angka melek huruf terhadap jumlah penduduk miskin masyarakat pedesaan di Kabupaten Nagekeo.
- 4) Bagaimana pengaruh jumlah penduduk yang tidak mendapat akses air minum bersih terhadap jumlah penduduk miskin masyarakat pedesaan di Kabupaten Nagekeo.
- 5) Bagaimana pengaruh jumlah penduduk tanpa akses fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin masyarakat pedesaan di Kabupaten Nagekeo.

- 6) Bagaimana pengaruh pemekaran wilayah terhadap jumlah penduduk miskin masyarakat pedesaan di Kabupaten Nagekeo.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui secara empiris:

- 1) Pengaruh PDRB perkapita terhadap jumlah penduduk miskin masyarakat pedesaan di Kabupaten Nagekeo.
- 2) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di sektor pembangunan terhadap jumlah penduduk miskin masyarakat pedesaan di Kabupaten Nagekeo.
- 3) Pengaruh angka tingkat melek huruf jumlah penduduk miskin masyarakat pedesaan di Kabupaten Nagekeo.
- 4) Pengaruh jumlah penduduk yang tidak mendapat akses air minum bersih terhadap jumlah penduduk miskin masyarakat pedesaan di Kabupaten Nagekeo.
- 5) Pengaruh jumlah penduduk tanpa akses fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin masyarakat pedesaan di Kabupaten Nagekeo.
- 6) Pengaruh pemekaran wilayah terhadap jumlah penduduk miskin masyarakat pedesaan di Kabupaten Nagekeo.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari pada penulisan ini adalah:

1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban ilmiah dalam meraih jenjang kesarjanaaan (S-1) pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selain itu juga, penelitian ini dijadikan peneliti sebagai media untuk memberikan informasi kepada mahasiswa dan peneliti lain yang berkaitan dengan pengaruh PDRB perkapita, Pengeluaran pemerintah di sektor pembangunan, angka melek huruf, jumlah penduduk yang tidak mendapat akses air minum bersih dan jumlah penduduk tanpa akses fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin masyarakat pedesaan di Kabupaten Nagekeo.

2) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau kepustakaan mengenai kajian tentang pengaruh PDRB perkapita, Pengeluaran pemerintah di sektor pembangunan, angka melek huruf, jumlah penduduk yang tidak mendapat akses air minum bersih dan jumlah penduduk tanpa akses fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin masyarakat pedesaan di Kabupaten Nagekeo sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh gambaran yang obyektif dalam memutuskan rancangan

kebijakan ekonomi sekaligus juga merupakan evaluasi perkembangan kinerja pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah.

1.5. Studi Terkait

Studi mengenai tingkat kemiskinan regional di Indonesia telah banyak dilakukan, diantaranya yang dilakukan oleh Saleh (2002). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan regional di Indonesia sebelum dan sesudah terjadinya krisis ekonomi. Adapun variable yang dipakai dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita, angka harapan hidup, rata-rata bersekolah, investasi fisik pemerintah daerah, tingkat kesenjangan pendapatan, tingkat partisipasi ekonomi dan politik perempuan, populasi penduduk tanpa akses terhadap fasilitas kesehatan, populasi penduduk tanpa akses terhadap air bersih, dan krisis ekonomi.

Selanjutnya Amar Samsul (2002) pernah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan pada masyarakat pedesaan di propinsi Sumatra Barat. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, aksesibilitas terhadap kelembagaan, luas penguasaan lahan, teknologi dan mata pencarian alternative secara bersama-sama menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kemiskinan sebuah rumah tangga. Ibnussalam Harahap (2004) melakukan analisis deskriptif untuk menggambarkan potensi fisik wilayah dan metode regresi linier berganda untuk menganalisis sejauhmana besarnya pengaruh tingkat faktor pendidikan dan luas lahan terhadap kemiskinan

masyarakat Desa Bulucina Tarutung Sihoda-hoda dan Desa Gonting Jae kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Tapanuli Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di tiga Desa tersebut termasuk dalam kategori kemiskinan absolut. Adapun faktor penyebab kemiskinan dilihat dari faktor potensi fisik dimana kondisi geografis dan curah hujan yang tidak mendukung. Kemudian rata-rata tingkat pendidikan kepala keluarga tergolong rendah tetapi dalam pengujian parsial (t-test) ternyata pengaruh tingkat pendidikan yang rendah ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat yang menyebabkan mereka miskin. Tetapi dalam pengujian secara serempak (F-test) kedua variabel tersebut (tingkat pendidikan dan luas lahan) ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pendapatan masyarakat.

Rahmat (2008) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB perkapita, total pengeluaran pembangunan perkapita, angka harapan hidup, angka tingkat melek huruf, rata-rata lama sekolah dan rasio penduduk yang tidak mendapat akses air bersih/minum terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten di propinsi Jawa Tengah. Usman, *et al* (2008) juga pernah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis determinan kemiskinan sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel yang dapat mengurangi kemiskinan adalah kepala rumah tangga yang bekerja, kepemilikan asset lahan pertanian dan jumlah tahun bersekolah seluruh anggota keluarga. Sedangkan variabel yang dapat menambah kemiskinan

dilihat dari nilai *marginal effect* adalah jumlah anggota rumah tangga, kepala keluarga sebagai buruh tani, sumber air yang tidak terlindung, dan kepala keluarga bekerja di bidang pertanian. Sedangkan rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap listrik akan menambah peluang menjadi miskin.

1.6. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang dapat diambil adalah:

- 1) PDRB Perkapita mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin masyarakat pedesaan di Kabupaten Nagekeo.
- 2) Pengeluaran Pemerintah di sektor pembangunan mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin masyarakat pedesaan di Kabupaten Nagekeo.
- 3) Angka melek huruf mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin masyarakat pedesaan di Kabupaten Nagekeo.
- 4) Jumlah penduduk yang tidak mendapat akses air minum bersih mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin masyarakat pedesaan di Kabupaten Nagekeo.
- 5) Jumlah penduduk tanpa akses fasilitas kesehatan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin masyarakat pedesaan di Kabupaten Nagekeo.

- 6) Pemekaran wilayah mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin masyarakat pedesaan di Kabupaten Nagekeo.

1.7. Definisi Operasional

Definisi operasional dipakai dalam penelitian guna menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran dan interpretasi terhadap data. Adapun definisi operasional terhadap variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin didefinisikan secara operasional sebagai banyaknya penduduk yang dikategorikan atau dikatakan miskin berdasarkan definisi penduduk miskin yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap jumlah penduduk yang terdapat di suatu daerah tertentu. Definisi penduduk miskin yang dimaksudkan oleh BPS tersebut menerangkan bahwa seseorang atau masyarakat dikatakan miskin apabila (TPMK, 2005):

- a) Rata-rata total pengeluaran atau konsumsi per bulan kurang dari rata-rata pengeluaran/konsumsi minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok sesuai dengan standar masyarakat sejahtera yang meliputi pengeluaran untuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Adapun besarnya pengeluaran per bulan adalah kurang dari Rp 200.000 per bulan untuk tahun 2008.
- b) Beban total pendapatan per bulan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok dari masing-masing anggota keluarga.

- c) Belum memiliki fasilitas kesejahteraan yang memadai berupa ketersediaan sekolah, fasilitas kesehatan (puskesmas), fasilitas air bersih, dan belum terdapat ketersediaan pelayanan kesehatan terpadu.
- d) Tidak memiliki sendiri tempat tinggal yang layak sesuai standar kelayakan hunian dari Departemen Sosial (Depsos) dan kurang terpenuhinya gizi keluarga sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan (Depkes).

2) PDRB Perkapita

PDRB per kapita didefinisikan sebagai besarnya total nilai PDRB riil di suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut. Mengenai PDRB menyatakan besarnya nilai tambah seluruh produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam wilayah domestik (Badan Statistik, 2009).

3) Pengeluaran Pemerintah di sektor pembangunan

Pengeluaran Pemerintah di sektor pembangunan didefinisikan sebagai pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai proses perubahan, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai yang dialokasikan untuk masing-masing daerah tingkat pedesaan/kelurahan yang dinyatakan ke dalam satuan mata uang Rupiah. Pada umumnya biaya pembangunan tersebut sudah di program dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA). Pengeluaran pembangunan semuanya diprogramkan dalam berbagai permintaan proyek disetiap sektor/sub sektor (statistik keuangan pemerintah daerah, 2000).

4) **Angka Melek Huruf**

Angka melek huruf didefinisikan secara operasional sebagai jumlah penduduk di suatu daerah yang berusia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis latin dan huruf lainnya terhadap total jumlah penduduk di daerah tersebut. (BPS Kabupaten Ngada, 2009).

5) **Jumlah Penduduk Yang Tidak Mendapat Akses Air Minum Bersih**

Jumlah penduduk yang tidak mendapat akses terhadap air minum bersih didefinisikan secara operasional sebagai jumlah penduduk yang terdapat di suatu daerah yang tidak memperoleh akses sarana air bersih.

6) **Jumlah Penduduk Tanpa Akses Fasilitas Kesehatan**

Jumlah penduduk tanpa akses fasilitas kesehatan didefinisikan sebagai jumlah penduduk di masing-masing desa di Kabupaten Nagekeo yang tidak mendapat akses fasilitas kesehatan.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat Kabupaten Ngada dan Nagekeo. Dengan memperhatikan pola penyusunan data yang terdiri atas data runtut waktu dan data *cross section*, maka jenis data yang digunakan adalah jenis data panel. Periode pengamatan menggunakan rentang waktu antara 2005 sampai tahun 2007 untuk mewakili periode sebelum pemekaran wilayah dan tahun 2008 dan tahun 2009 untuk mewakili periode sesudah pemekaran wilayah.

1.8.2. Model Penelitian

Model penelitian terdiri atas dua macam, yaitu model teoritis dan model yang ditaksir. Model teoritis yang digunakan dalam penelitian ini dituliskan sebagai berikut:

$$TK = f(\text{PDRBK}, \text{PPP}, \text{AMH}, \text{RPA}, \text{PPK}, \text{Dummy}) \dots\dots\dots (1.1)$$

di mana:

TK = Jumlah penduduk miskin (jiwa)

PDRBK = Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (ribu Rupiah)

PPP = Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan (ribu Rupiah)

AMH = Angka melek huruf (jiwa)

RPA = Jumlah penduduk yang tidak mendapat akses air minum bersih (jiwa)

PPK = Jumlah penduduk tanpa akses fasilitas kesehatan (jiwa)

Dummy = Variabel boneka yang menjelaskan periode sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.

Untuk model yang ditaksir, yaitu model yang dipergunakan pada regresi data panel dituliskan:

$$\begin{aligned} TK_{it} = & a_0 + a_1 \text{PDRBK}_{it} + a_2 \text{PPP}_{it} \\ & + a_3 \text{AMH}_{it} + a_4 \text{RPA}_{it} + a_5 \text{PPK}_{it} + a_6 \text{Dummy} + e_{it} \dots\dots\dots (1.2) \end{aligned}$$

di mana notasi a_0 menyatakan variabel konstan (konstanta), sedangkan untuk parameter a_1 , a_2 , a_3 , a_4 , a_5 , dan a_6 masing-masing menyatakan koefisien dari variabel independen. Variabel Dummy di sini menyatakan variabel boneka yang

menjelaskan periode sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. Untuk parameter e menyatakan variabel gangguan atau *disturbance error*.

1.8.3. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan adalah analisis data panel. Metode estimasi dengan menggunakan data panel memiliki perbedaan secara teknis dengan jenis data bukan data panel seperti data runtut waktu atau data *cross section*. Hal ini dikarenakan data panel memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis data yang hanya berupa data runtut waktu ataupun hanya berbentuk data *cross section* (Gujarati, 2003). Ada dua pendekatan yang digunakan untuk analisis data panel, yaitu:

1) Pendekatan *Fixed Effect*

Pendekatan *fixed effect* diperlukan untuk menerangkan pola-pola yang umumnya terjadi pada estimasi jenis data panel. Apabila sumber data berasal dari data agregat, maka kecenderungan model yang digunakan adalah *fixed effect model* (FEM).

2) Pendekatan *Random Effect*

Analisis dengan pendekatan *fixed effect* cenderung menjadi tidak efektif digunakan apabila ditemukan permasalahan pada derajat kebebasan (*degree of freedom*) pada hasil estimasi model data panel. Oleh karenanya, apabila sumber data berasal dari sampel, maka dugaan model data panel yang digunakan adalah *random effect model* (REM).

1.8.4 . Uji Spesifikasi Model

Analisis yang akan digunakan dalam penelitian menggunakan analisis data panel yang dapat berupa analisis untuk model *fixed effect* atau model *random effect*. Untuk keperluan memilih model penelitian data panel, maka akan digunakan dua tahap uji spesifikasi, yaitu uji signifikansi dan uji Hausman.

1.9. Sistematika Penulisan

Dalam karya tulis ini dibagi dalam beberapa bab secara umum, pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan dibahas secara berurutan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi terkait, hipotesis penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini dijelaskan tentang kemiskinan secara keseluruhan yang mencakup pengertian dan indikator kemiskinan serta faktor-faktor yang secara teoritis mempengaruhi tingkat kemiskinan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai sumber dan jenis data, model penelitian, dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

IV ANALISIS DATA

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil analisis data yang meliputi tahap uji statistik terutama yang menerangkan tentang faktor-faktor

yang mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat pedesaan di Kabupaten Nagekeo.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian deskripsi dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Pada bagian ini disajikan kesimpulan dan saran yang dapat diajukan dalam hasil penelitian ini.

